



KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN WHISTLEBLOWER DAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KKP



Oleh Drs. **CIPTO HADI PRAYITNO**
Inspektur V, Inspektorat Jenderal KKP



**28 Maret
2018**

Dasar Hukum



- 1 **Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN**
- 2 **Tata Cara Pelaksanaan dan Peran Serta Masyarakat dan pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan TIPIKOR**
- 3 **Disiplin Pegawai Negeri Sipil**
- 4 **Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025, dan Jangka Menengah Tahun 2012 -2014**
- 5 **Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di lingkungan KKP**
- 6 **Tim Penanganan Pengaduan KKP**
- 7 **Tim Sekretariat Penanganan Pengaduan KKP**

Jenis Pengaduan



Sesuai Pasal 3 (Permen KP 31/2013)

- o Setiap Pegawai yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin Pejabat/Pegawai, dan/atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Kementerian **wajib** menyampaikan Pengaduan.
- o Masyarakat yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, dan/atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Kementerian **dapat** menyampaikan Pengaduan.

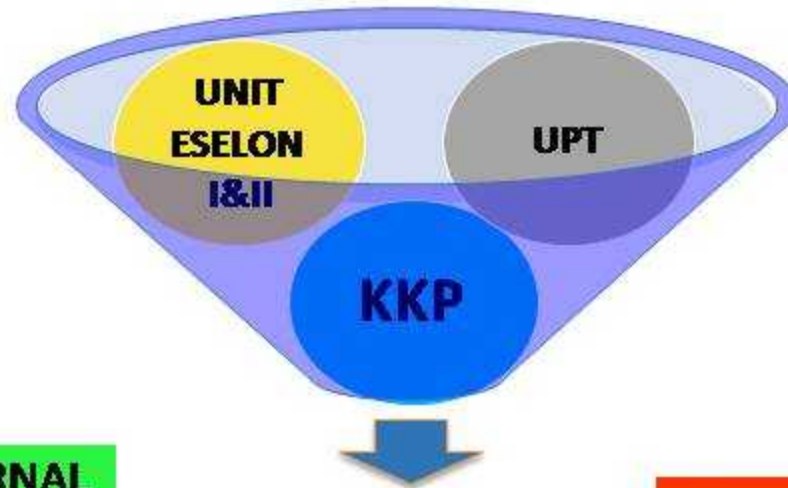
JENIS PENGADUAN :

- ✓ Penyalahgunaan Wewenang
- ✓ Pelanggaran Disiplin Pejabat/Pegawai
- ✓ Tindak Pidana KKN oleh Pejabat/Pegawai KKP
- ✓ Hambatan dalam Pelayanan Kepada Masyarakat

Kondisi Awal Pengelolaan Pengaduan

- **PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN BELUM SAMPAI DENGAN TINGKAT UPT;**
- **TUGAS PENGELOLAAN PENGADUAN MASIH DIANGGAP SEBAGAI TUGAS TAMBAHAN, SEHINGGA TINDAK LANJUT/RESPON LAMBAT;**
- **PETUGAS PENGELOLAAN PENGADUAN CENDERUNG TIDAK MEMADAI/BELUM DIBERIKAN PELATIHAN KHUSUS;**
- **PENGELOLAAN PENGADUAN BELUM DIDUKUNG ANGGARAN YANG MEMADAI;**
- **PELAPORAN PENGADUAN OLEH TIM ESELON I MASIH MANUAL DAN CENDERUNG TIDAK MENYAMPAIKAN KEPADA INSPEKTORAT JENDERAL;**
- **DATA DAN INFORMASI PENGADUAN PADA TIM SEKRETARIAT PENGADUAN KKP, BELUM MENGGAMBARAKAN KESELURUHAN PENGADUAN DI KKP.**

KONDISI YANG DIHARAPKAN



INTERNAL

1. Pengelolaan pengaduan terintegrasi berbasis teknologi informasi dari tingkat terbawah sampai unit tertinggi.
2. Mekanisme dan prosedur transparan dan akuntabel serta berjenjang dari tingkat terbawah sampai unit tertinggi.
3. Sumberdaya manusia yang mengelola pengaduan telah terlatih dan kompeten dalam pengelolaan pengaduan.

EKSTERNAL

Pegawai dan masyarakat sudah memiliki kesadaran akan partisipasi dan pentingnya pengaduan, berani menyampaikan pengaduan, dan mempunyai sikap bahwa pengaduan berguna bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga orang lain dan untuk kementerian kelautan dan perikanan

RENCANA AKSI

Integrasi Sistem Pengelolaan Pengaduan KKP Tahun 2017-2018

LATAR BELAKANG :

1. Permen PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang *Road Map* Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional,
2. Permen PAN dan RB Nomor 24 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
3. Kepmen KP Nomor 6/KEPMEN-KP/2016 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019

DESEMBER 2017

1. Integrasi Sistem Pengaduan pada Tingkat KKP, Eselon I dan UPT Wilayah/Regional Jawa
2. Penyusunan Draft Revisi Permen KP No. 31/PERMEN-KP/2013 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Di Lingkungan KKP
3. Penyusunan Draft Kepmen KP tentang Tim Penanganan Pengaduan Terpadu Di Lingkungan KKP
4. Implementasi Penggunaan Aplikasi LAPOR!-KSP

JAN-MARET 2018

1. Integrasi Sistem Pengaduan pada UPT Wilayah/Regional Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua
2. Finalisasi Revisi Permen KP No. 31/PERMEN-KP/2013 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Di Lingkungan KKP
3. Finalisasi Kepmen KP tentang Tim Penanganan Pengaduan Terpadu Di Lingkungan KKP
4. Implementasi Penggunaan Aplikasi LAPOR!-KSP

APRIL-DESEMBER 2018

1. Sosialisasi Peraturan terkait Penanganan Pengaduan Di Lingkungan KKP
2. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Integrasi Sistem Pengaduan
3. Pemutakhiran Data dan Apresiasi Petugas Pengelola Pengaduan Semester I dan II
4. Inisiasi Integrasi Sistem Whistleblowing System atau Terintegrasi Antar Sistem (TEGAS) kerjasama dengan KPK dan PPAK

SALURAN PENGADUAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



whistleblower.kkp.go.id



pengaduan@kkp.go.id



0811989011



021-46662111



PO BOX 111.JKP.10000



☉ Sekretariat Penanganan Pengaduan pada Inspektorat V,
Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Gedung Mina Bahari III Lantai 5, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110




- ☉ di samping kiri Pintu Masuk Gedung Mina Bahari I, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110;
- ☉ di samping kanan Pintu Masuk Gedung Mina Bahari II, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110;
- ☉ di samping kanan Pintu Masuk Gedung Mina Bahari III, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110; dan/atau
- ☉ di samping kanan Pintu Masuk Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kompleks Bina Samudera, Jl. Pasir Putih I, Ancol Timur, Jakarta 14430.





Terima Kasih

 ciptohadi5@yahoo.co.id